BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pendampingan

1. Pengertian Pendampingan

Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan kepuutusan, sehinggan kemandirian dapat diwujudkan. [18]Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip yakni membantu orang. Dalam konteks kali ini ditugaskan sebagai pendamping bukan pemecah masalah.

Menurut Sumodiningrat pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Pendampingan sebagai strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui :

[18] Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan trauma center*, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), hlm. 4

a. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi, sedangkan untuk masalah ketrampilan bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang dari luar. Hal-hal seperti ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan sumber penghidupan mereka sendiri dan membantu meningkatkan ketrampilan dan keahlian mereka sendiri.

b. Mobilisasi Sumber modal

Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial.[19]

2. Tujuan pendampingan

a. Memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi dilingkungan tersebut

[19] Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat,* (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1997), hlm. 79

b. Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani masalah

Sebuah kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping adalah mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegaiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada implementasinya.

Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Dan kelompok pendamping dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap altenatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut positif terhadap kelompoknya.

3. Peran Pendampingan

Pendampingan sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup dua peran utama, yaitu:[20]

a. Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negoisasi, memberi dukungan, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

b. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

B. Konsep Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina.[21] Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau

[20] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat memberdayakan rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.200

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.[22] Pembinaan juga dapat diartikan: " bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.[23]Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan.

2. Tujuan Pembinaan

   a. Untuk mengembangkan keahlian sehingga pengurus dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat.
   b. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya secara rasional.
   c. Untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin).

---

[21] tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

[22] Masdar Helmi, *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, (Semarang Toha Putra, 1973).

[23] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 144.

Mathis juga mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain: [24]

1. Mengatur stretegi. Yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
2. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan.
3. Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.
4. Memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan.

[24] Mathis dan Johnson. *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 307-308.

Sedangkan komponen-komponen pembinaan yang dijelaskan oleh Mangkunegara terdiri dari:[25]

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat dikur.
2. Para pembina yang profesional.
3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.[26] Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional. BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.[27] Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga

---

[25] Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm.76.

[26] Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, 2015), hal. 10

[27]Departemen Pendidikan Nasional. *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.* (Universitas Brawijaya : Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi, 2007), hal. 4.

merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota *(one for all).*

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa.[28]

Dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah:[29]

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.

[28] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

[29] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi:

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.[30]

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa maupun masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama.

2. Tujuan BUMDes

Adapun empat tujuan utama dalam pendirian BUMDes yaitu[31]:

a. Meningkatkan perekonomian desa
b. Meningkatkan pendapatan asli desa

[30] Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

[31] Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal.18

c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

3. Dasar Hukum BUMDes

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut[32]:

a. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

4. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh

[32] Andriani Sari, *Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*, (Universitas Sumatera Utara, 2017), hal. 12

pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu[33]:

a. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

D. Penggerak Ekonomi

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu cara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

[33] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hal. 12

Transmigrasi (KEMENDES PDTT) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. BUMDes diharapkan dapat menjadi lembaga kunci penggerak ekonomi desa. Pengelola BUMDes harus mampu terus meningkatkan inovasi dan kreatifitasnya untuk ikut serta dan menjadi garda terdepan pembangunan ekonomi masyarakat

1. Peran Penggerak Ekonomi :[34]
   a. Turut membantu pemerintah desa dalam kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah desa.
   b. Membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan.
   c. Memperluas kesemapatan kerja serta ikut memperkecil masalah pengangguran, kriminalitas dan lainnya.
   d. Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
   e. Sebagai mitra masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi**,** yaitu :
   a. Sumber Daya Alam

      Faktor sumber daya alam merupakan faktor penentu dari suatu kegiatan ekonomi. Dengan adanya sumber daya alam yang memadai seperti: tanah, air, udara, mineral, air, tumbuhan, hewan, dll maka suatu

[34] Sukarno Wibowo dan Dedi Supri, *Ekonomi Makro Islam,* (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), hlm.17

kegiatan ekonomi dapat terlaksana. Jika dilihat dari sumber daya alam, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam yang dimiliki. Adapun peran dari sumber daya alam yaitu sebagai bahan dasar untuk semua produksi, dalam sumbernya sebagai berikut:

1) Dengan adanya sumber daya alam maka dapat menghasilkan suatu produk yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2) Dalam penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan berbagai dampak yang akan terjadi kedepannya, karena banyak nantinya yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

Jadi, antara besarnya sumber daya alam dan pertumbuhan suatu kegiatan ekonomi mempunyai keterhubungan. Semakin banyakmya sumber daya alam maka semakin majumya kegiatan ekonomi maka akan terjadi pengurangan sumber daya alam. Oleh karena itu haruslah mengatur sedemikian rupa dalam penggunaan sumber daya alam agar nantinya tidak akan terjadi kelangkaan.

b. Sumber Daya Manusia

Selain sumber daya alam, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam kegiatan ekonomi. Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting yaitu sebagai orang yang menciptakan kegiatan ekonomi dan orang yang melakukan pembangunan dalam kegiatan ekonomi dapat berperan sebagai tenaga kerja seorang pengusaha, dan beberapa peran lainnya, yaitu:

1. Dalam kegiatan ekonomi, tentunya sumber daya manusia dituntut untuk selalu mempunyai ketrampilan dan meningkatkan kualitas.
2. Ketrampilan sumber daya manusia yang dimiliki sangat mempengaruhi terhadap perkembangan ekonomi di negaranya sendiri.

Untuk terciptanya manusia yang berkualitas harus didasari kesadaran akan pentingnya pendidikan. Setidaknya kita harus menempuh pendidikan hingga sekolah menengah atas atau kejuruan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu negara.

c. Sumber Daya Modal

Faktor ketiga yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yaitu sumber daya modal. Ada tidaknya modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk negara maju tidak perlu diragukan lagi sumber daya modal yang mereka punya sangat mencukupi dalam proses kegiatan ekonomi. Dan sebaliknya negara berkembang sangat membutuhkan banyak modal untuk proses kegiatan ekonominya. Salah satu upaya untuk mendapatkan sumber daya modal pada negara berkembang yaitu dengan melakukan pembentukan dan juga pengembangan investasi.

E. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang

memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.[35]

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam.[36]

2. Pengertian Kesejahteraan ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.[37] Kesejahteraan ekonomi adalah proses kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. bagi masyarakat miskin dapat membawa kemandirian dan pendapatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya pinjaman modal usaha dapat membantu untuk bisa mengembangkan usaha yang telah ada menjadi lebih

---

[35] Menurut UU tentang kesejahteraan

[36] Mita Noveria, *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan,* (Jakarta: LIPI Pers, 2011), hlm.22

[37] Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro,* (Jakarta: Gemapress, 1999), hlm.23

baik. Apabila usaha mereka lebih baik maka kondisi keuangan mereka akan meningkat dan dapat dipastikan akan terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai pendampingan dan pembinaan badan usaha milik desa banyak dilakukan dan dipublikasikan dalam berbagai karya, baik dalam bentuk jurnal maupun hasil penelitian seperti skripsi. Penelitian tersebut dihasilkan oleh beberapa peneliti yang salah satunya seperti:

Pertama, penelitian Asih Widi Lestari[38] yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan judul *Peran Pemerintah desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Deskriptif yang meneliti satu variabel yaitu Peran Pemerintah dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yakni sebagai pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi BUMDes serta sebagai pengawasan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rezky Susanti yang dilaksanakan pada Februari 2015 dengan judul "*Efektivitas Pendampingan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan*

[38] Asih Dwi Lestari, *Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa*, (Malang: Unversitas Tribuana Tunggadewi Malang FISIP Ilmu Administrasi Negara, 2016).

di Desa Sekodi kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis".[39] Penelian ini menggunakan analisis kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat yang masih kurang tahu tentang keberadaan pendamping desa, kehadiran pendamping desa, pendampingan pada pelaksanaan program, pendampingan pada pengawasan pembangunan, komunikasi pendamping desa dinilai kurang baik. Masyarakat masih kurang setuju dengan keberlanjutan program bahkan ada masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pendampingan serta kendala pembangunan yang terjadi di desa masih perlu pembenahan yang kuat dari sosok pendamping desa harus benar-benar mampu dan rutin menjalankan tugasnya sebagai pendamping desa.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rio Halomoan[40] yang dilaksanakan pada Februari 2017 dengan judul "*Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014 (Studi BUMDes Mitra Usaha Mulya dan BUMDesa Langkitin di Kecamatan Rambah Samo)".* Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa strategi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Koordinator Badan Usaha Milik Desa memberi kontribusi dan meningkatkan perkembangan

---

[39] Rezky Susanti, *Efektivitas Pendampingan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis",* Universitas Riau Pekanbaru: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 2 No. 1-Februari 2015

[40] Rio Halomoan, *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014 (Studi BUMDes Mitra Usaha Mulya dan BUMDesa Langkitin di Kecamatan Rambah Samo,* Universitas Riau: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4 No. 1 – Februari 2017

BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu. Strategi Pemerintah Daerah yaitu menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha. Disamping itu juga ada salah satu BUMDes yang dinilai tidak berhasil perkembangannya, faktor penghambat perkembangannya adalah partisipasi masyarakat kurang dalam penggunaan jasa BUMDes, hambatan pembinaan dan hambatan sumber daya manusia.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Martien Herna Susanti[41] yang dilaksanakan pada januari-juni 2017 yang berjudul *"Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat menuju Desa Mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal"*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan menyebabkan masyarakat desa semata-mata diposisikan sebagai objek atau sasaran pembangunan. Disinilah peran pendampingan menjadi strategis dalam mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan desa mandiri yang mampu bertindak selaku subjek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secaara partisipatif

[41] Martien Herna Susanti, *Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat menuju Desa Mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*,Universitas Negeri Semarang : Jurnal Fakultas Ilmu Sosial No.1/TH.XXVIII/2017.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Romzah[42] yang dilaksanakan pada Agustus 2018 yang berjudul "*Optimalisasi Fungsi Pendampingan Desa dalam Pembangunan Desa Sukorejo dan Desa Karanganom di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa mekanisme kinerja pendampingan lokal desa dalam pembangunan di desa sukorejo dan karanganom meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau evaluasi. Terdapat perbedaan dari dua desa tersebut dilihat dari peran masyarakat mengenai pembangunan seperti kurangnya aspirasi dalam forum rembug desa dan musrenbangdes. Kesadaran masyarakat akan pembangunan perlu ditingkatkan karena masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pemerintahan desa juga ditemukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga transparansi pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan.

Tidak semua pemerintah dan masyarakat desa menerima keberadaan pendamping desa, sehingga perlu adanya sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya peran pendamping lokal desa dalam pembangunan. dan untuk meningkatkan program pembangunan di desa, perlu diiringi dengan kaderisasi perangkat desa agar pembinaan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan

[42]Siti Romzah, *Optimalisasi Fungsi Pendampingan Desa dalam Pembangunan Desa Sukorejo dan Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan,* (Surabaya : Skripsi tidak diterbitkan, 2018)

pendamping desa dapat berjalan sistematis. Pendamping lokal desa memberi manfaat yang positif bagi desa seperti membantu, membimbing dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa. namun dari tingkat efektifitasnya peran pendamping lokal desa belum sepenuhnya efisien karena sumber daya yang ada belum diberdayakan secara optimal.

Jadi, menurut beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas terdapat beberapa persamaan, selain terkait jenis penelitian dan metodologi penelitian adapun persamaan yang mengkaji tentang peran pendampingan yang dilaksanakan di desa dalam menyiapkan sumber daya manusia dan dari penelitian yang sudah dilaksanakan terdapat perbedaan berupa objek penelitian dan subjek penelitian, kemudian dalam penelitian ini membahas terkait peran pendampingan dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa sebagai penggerak ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Kerangka Berfikir Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :

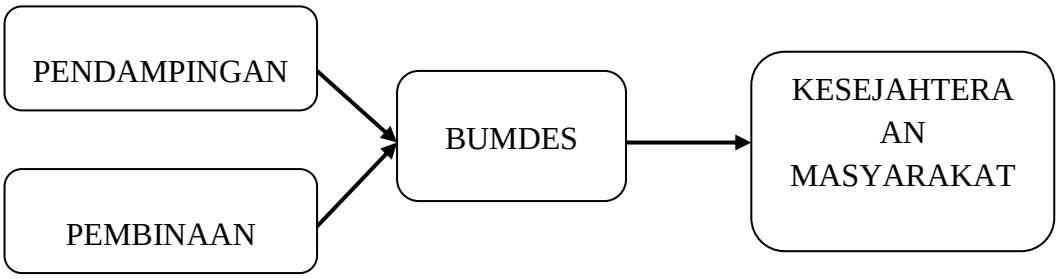

Gambar 2.1 : kerangka berfikir